

PERGOLAKAN DI IRAN DAN IMPAKNYA ATAS KAWASAN DAN DUNIA

B. WIROGUNO

Pada 11 Pebruari 1979 Pemerintah Shapour Bakhtiar mundur setelah pimpinan Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan keputusannya untuk mengambil sikap netral dalam sengketa politik dan memberikan perintah kepada pasukan-pasukan agar kembali ke asrama-asrama sambil menandakan bahwa Angkatan Bersenjata mendukung kemauan rakyat. Dengan demikian gerakan perlawanan pimpinan Ayatullah Khomeini mencapai sasarannya menumbangkan kekuasaan Shah Reza Pahlevi. Sebagai lanjutan, pada hari berikutnya Dr. Mehdi Bazargan, yang pada 6 Pebruari 1979 ditunjuk oleh Khomeini sebagai Perdana Menteri, membentuk *Pemerintah Revolusioner Sementara* dengan empat tugas pokok, yaitu (1) memulihkan keamanan dan ketertiban; (2) melancarkan kembali perekonomian nasional yang sejak beberapa bulan lumpuh akibat pemogokan-pemogokan; (3) melaksanakan politik luar negeri yang independen dan tidak memihak dalam sengketa Timur-Barat; dan (4) meletakkan dasar-dasar bagi Republik Islam Iran.¹ Pemerintah baru itu bergerak dengan cepat, akan tetapi menghadapi banyak kesulitan, khususnya karena segera setelah berhasil menyingkirkan Shah, koalisi lawan-lawannya pecah akibat munculnya perbedaan pendapat mengenai hari depan Iran dan terjadi *suatu pere-*

1 Lihat berita AP dalam *The Straits Times*, 16 Pebruari 1979

butan kekuasaan baru. Kita belum tahu dengan pasti kekuatan mana akan keluar sebagai pemenang, akan tetapi siapapun akan berkuasa, pergolakan di Iran itu mempunyai pengaruh penting, bukan saja atas kawasan melainkan juga atas dunia dan perimbangan kekuatan global.

1. FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN GERAKAN OPOSISI

Gerakan oposisi itu berhasil mencapai sasarannya karena berbagai faktor. Pertama, gerakan berhasil melibatkan hampir segala lapisan masyarakat dan menjadi *gerakan massal*. Gerakan mulai pada awal 1978 sebagai suatu gerakan keagamaan tetapi cepat meluas sampai akhirnya mengikutsertakan mayoritas rakyat. Dalam gerakan itu terdapat unsur-unsur sayap kiri seperti mahasiswa serta buruh Marxis dan kelompok gerilya *Fedayin*; unsur-unsur sayap kanan seperti golongan fundamentalis Islam yang terdiri atas para mullah dan pengikut-pengikut mereka; dan unsur-unsur tengah seperti kebanyakan cendekiawan dan golongan profesi serta bisnis modern.¹

Bahwa gerakan menjadi gerakan massal itu terutama adalah akibat meluasnya ketidakpuasan di kalangan rakyat dengan pemerintahan Shah dan strategi pembangunan serta modernisasinya. Antara lain dapat disebutkan pemerintahan otoriter yang menindas kebebasan-kebebasan politik dan menindak dengan kekerasan lawan-lawan; pembangunan nasional yang terlalu menekankan pembangunan industri dan militer tetapi sama sekali mengabaikan pembangunan politik; alokasi terlalu banyak dana untuk pembangunan militer dalam rangka ambisi Shah untuk menjadikan negaranya kekuatan dominan di kawasan, sehingga dana untuk pembangunan ekonomi dan sosial berkurang; kegagalan banyak program pembangunan ekonomi yang menelan banyak biaya tetapi tidak memberikan hasil yang diharapkan karena tidak disiapkan dengan matang; inflasi yang terus meningkat akibat meningkatnya pendapatan minyak dan penge-

1 Lebih lanjut lihat karangan "The Shah's Divided Land", *Time*, 18 September 1978, yang mengulas pergolakan di Iran itu secara panjang lebar.

luaran pembangunan sehingga daya beli rakyat banyak menjadi semakin kecil; korupsi besar-besaran yang melibatkan keluarga Shah dan pejabat-pejabat; kepincangan pembagian pendapatan nasional yang menyolok sehingga kekayaan luar biasa dan kemewahan berdampingan dengan kemiskinan luas yang mencekam; suatu politik luar negeri yang terlalu pro Barat dan kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional; dan berbagai segi pembangunan serta modernisasi yang dianggap membahayakan nilai-nilai agama dan mengancam kedudukan alim ulama. Karena alasan-alasan itu sebagian besar rakyat tidak puas dengan rezim Shah dan terbuka untuk himbauan gerakan untuk bersama-sama melawan Shah.¹

Kedua, dalam Ayatullah Khomeini gerakan oposisi menemukan *pemimpin yang tepat*. Tokoh ini telah lanjut usia, dipandang sebagai seorang suci dan dikenal sebagai seorang lawan Shah yang gigih. Selain itu sebagai pemimpin terkemuka Shia, dia mempunyai pengaruh yang besar, bukan saja rohani keagamaan melainkan juga politik dan sosial. Secara demikian dia mudah mengerahkan rakyat atas nama agama untuk menggulingkan rezim Shah yang dicapnya sebagai tidak sah.

Atas seruannya *rakyat turun ke jalan-jalan* dalam jumlah yang semakin besar untuk memperkuat tuntutan-tuntutan gerakan oposisi. Demonstrasi-demonstrasi itu menjadi pameran kekuatan yang mengesankan dan karena berlangsung secara damai sesuai dengan instruksi pimpinan gerakan juga menunjukkan bahwa gerakan menguasai massa. Oleh sebab demonstrasi-demonstrasi diadakan terus menerus dan diikuti semakin banyak orang, moral pasukan-pasukan yang dikerahkan untuk membubarkan atau mengawasinya lambat laun menurun.

Faktor lain adalah *pemogokan-pemogokan umum* yang dilancarkan pegawai negeri dan kaum buruh atas seruan pimpinan gerakan. Sebagai akibatnya roda pemerintahan maupun

1 Faktor-faktor perlawanan terhadap Shah Iran ini dibahas secara mendalam dalam karangan James A. Bill, "Iran and the Crisis of '78", *Foreign Affairs*, Winter 1978, hal. 323-342; lihat juga Ervand Abrahamian, "Why the Shah is in so much Trouble", *The Indonesia Times*, 20 September 1978

perekonomian menjadi lumpuh. Khususnya pemogokan buruh minyak mempunyai akibat yang parah. Produksi minyak yang sebelumnya mencapai lebih dari 6 juta barrel sehari hampir berhenti sama sekali sehingga Iran sendiri kekurangan minyak. Sebagai akibatnya pendapatan minyak Iran berhenti dan pemerintah terpaksa membatalkan banyak kontraknya serta menghentikan banyak proyek pembangunannya. Pemogokan-pemogokan itu ternyata memainkan peranan yang penting dalam sukses gerakan. Pemerintah Iran dihadapkan dengan bahaya bankrut.¹

Selain itu oposisi mempunyai *berbagai organisasi gerilya* dan sel-sel dalam tubuh Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Udara, yang ternyata memainkan peranan menentukan pada tahap terakhir perlawanan, ketika mereka memulai pemberontakan bersenjata dan menyerang asrama-asrama militer, gudang-gudang senjata dan pos-pos polisi. Secara demikian terjadi pertempuran-pertempuran antara mereka dan pasukan-pasukan pemerintah. Untuk menghindari eskalasi perang saudara dan pertumpahan darah lebih lanjut pimpinan Angkatan Bersenjata memutuskan untuk mengambil sikap netral dan menarik pasukan-pasukan ke asrama-asrama. Secara demikian tidak terjadi eskalasi perang saudara, tetapi Angkatan Bersenjata menjadi berantakan. Kebanyakan prajurit melepaskan seragam mereka dan lari atau bergabung dengan pejuang-pejuang oposisi. Sebagai akibatnya Pemerintah Bakhtiar jatuh dan ribuan orang bersenjata bergerak dengan leluasa dan menduduki tempat-tempat strategis seperti gedung radio dan televisi, parlemen, gudang-gudang senjata dan gedung-gedung pemerintah.²

2. PEREBUTAN KEKUASAAN BARU

Akan tetapi jatuhnya rezim Shah itu tidaklah berarti bahwa pergolakan di Iran berakhir. Dalam kenyataan koalisi oposisi

1 Lihat Martin Woollacott, "How the Imperial Construction Seti Fell Apart", *The Guardian*, 21 Januari 1979

2 Lihat *Suara Karya*, 12 Februari 1979; lihat juga karangan "Guns, Death and Chaos", *Time*, 26 Februari 1978

segera pecah akibat munculnya perbedaan pendapat mengenai hari depan Iran dan kedudukan masing-masing anggotanya. Dengan demikian terjadi *suatu perebutan kekuasaan baru*, yaitu antara Khomeini dan pengikut-pengikutnya di satu pihak dan golongan kiri serta golongan moderat di lain pihak. Selain itu berbagai minoritas menggunakan kesempatan itu untuk menuntut hak-hak mereka, termasuk otonomi daerah mereka.¹

Dalam teori kekuasaan tertinggi di Iran setelah kekuasaan Shah ditumbangkan adalah pada *Dewan Revolusi Islam* yang dibentuk oleh Khomeini sebelum dia kembali ke Iran. Sebagai ketuanya Khomeini kemudian menunjuk Dr. Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri dan mengesahkan kabinet yang dibentuknya serta program kerjanya. Akan tetapi kekuasaan *Dewan Revolusi* itu mendapat tantangan berat, khususnya dari golongan kiri termasuk kelompok gerilya *Fedayin*. Pemberontakan bersenjata tersebut dimulai oleh kaum *Fedayin* sebelum Khomeini memberikan perintah. Kemudian kebanyakan orang yang berhasil merampas senjata dalam pemberontakan itu mengabaikan seruannya agar menyerahkan senjata mereka kepada *komite revolusionernya*. Kini terdapat banyak kelompok bersenjata yang menantang kekuasaan *Dewan Revolusi*. Mereka bertekad untuk ikut bicara dalam penataan kembali masyarakat dan negara Iran untuk memberinya suatu watak progresif.² Demikianpun komite-komite yang dibentuk di kalangan buruh industri termasuk industri minyak untuk mengatur pemogokan-pemogokan menyadari bahwa mereka mempunyai kekuasaan dan bertekad untuk menggunakannya guna memberikan orientasi radikal kepada revolusi. Mereka mengemukakan bahwa revolusi nasional dengan dimensi keagamaan telah menggerakkan suatu perubahan yang harus diperhitungkan. Dengan tegas mereka menolak didirikannya Republik Islam Iran menurut gagasan *teokrasi* Khomeini, dan sebagai gantinya memperjuangkan dibentuknya suatu negara *demokrasi rakyat* menurut pola negara sosialis.³

1 Lihat "Now, Another Power Struggle", *Time*, 5 Maret 1978

2 Lihat karangan Paul Balta, "The Guerillas Feel Left Out", *The Guardian*, 4 Maret 1979

3 Lihat laporan AP dalam *The Indonesia Times*, 24 Pebruari 1979

Gagasan *teokrasi* Khomeini itu juga ditentang oleh kaum nasionalis moderat yang memperjuangkan dibentuknya suatu negara *demokrasi sosial* yang modern di mana hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan demokrasi, khususnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dijunjung tinggi. Dalam kelompok ini termasuk *Front Nasional* Dr. Karim Sanjabi yang duduk dalam Kabinet Bazargan sebagai Menlu, *Gerakan Pembebasan Iran* PM Bazargan, dan kebanyakan kaum cendekiawan serta golongan profesi yang mendapat pendidikan Barat. Dalam kelompok ini kiranya juga dapat dimasukkan golongan wanita militan serta pendukung-pendukung mereka yang memperjuangkan persamaan hak antara pria dan wanita, lagi pula pemimpin-pemimpin agama Shia yang menyadari bahwa sejak jaman Nabi keadaan telah banyak berubah dan muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Mereka ini telah puas kalau negara dan undang-undangnya tidak melanggar asas-asas Islam yang terdapat dalam Quran, Sunna dan Hadis. Sehubungan dengan itu mereka menganggap perlu tetapi juga cukup kalau dalam negara dibentuk suatu dewan ahli hukum shariat yang diberi hak veto atas semua rancangan undang-undang seperti ditetapkan dalam konstitusi Iran tahun 1906.

Pemerintah Bazargan itu sendiri tidak selalu tunduk kepada *Dewan Revolusi Islam*, khususnya dalam hal-hal yang merupakan urusan dan kompetensinya. Dengan keras PM Bazargan mengecam *komite-komite revolusioner Dewan Revolusi Islam* yang menentangnya dan melawan ketetapan-ketetapannya, memasukkan orang-orang ke dalam penjara, menyerang kedutaan-kedutaan asing, dan secara demikian membuat malu bangsa dan menghancurkan nama baik Pemerintah dan Khomeini itu sendiri. Khususnya dia mengecam *pengadilan-pengadilan revolusioner Dewan Revolusi Islam* yang mengadili bekas-bekas pejabat atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, korupsi dan lain sebagainya, dan menjatuhkan hukuman mati atas mereka. Dia mengancam akan meletakkan jabatan kalau mereka terus mengacau dan membuat malu bangsa, sambil berseru kepada rakyat agar membantu menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi lebih sulit akibat banyaknya senjata dalam peredaran.¹ Oleh sebab

¹ Lihat *Kompas*, 2 Maret 1979

peringatannya itu tidak dihiraukan oleh *komite-komite revolusioner* dan *pengadilan-pengadilan revolusioner Islam*, pada 8 Maret 1979 PM Bazargan menemui Khomeini untuk mengembalikan mandatnya dengan mengatakan bahwa pemerintahnya dihambat oleh komite-komite tersebut. Akan tetapi Khomeini menolaknya dan berjanji akan mendukung pemerintahnya.¹ Rupanya dia menyadari bahwa dia memerlukan Bazargan untuk mendapatkan dukungan kaum cendekiawan dalam negeri dan menarik sekitar 100.000 ahli Iran yang hidup di luar negeri. Jasa-jasa mereka sangat dibutuhkan untuk membangun dan memodernisasikan Iran.²

3. ARAH PERKEMBANGAN

Dengan demikian terdapat beberapa kemungkinan mengenai hari depan Iran. Kemungkinan mana akan menjadi kenyataan untuk sebagian besar bergantung pada besarnya kekuatan yang mendukung atau menentanginya. Sehubungan dengan itu rupanya kita dapat membuat perkiraan seperti berikut. Pertama, kemungkinan pembentukan *republik rakyat* tidaklah besar. Walaupun golongan kiri mempunyai organisasi baik dan mempunyai banyak orang bersenjata, termasuk kelompok *Fedayin* yang populer karena memelopori pemberontakan bersenjata, jumlah mereka tidak besar. Namun kalau *Dewan Revolusi Islam* pimpinan Khomeini tetap berkeras terhadap mereka dan tidak bersedia mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka, akan terjadi suatu polarisasi kekuatan dan perang saudara. Pada tahap sekarang ini Angkatan Bersenjata Iran masih dalam keadaan demoralisasi dan tidak dapat berbuat banyak untuk menegakkan kekuasaan Pemerintah Bazargan. Selain itu kelompok gerilya *Mujahidin* yang mula-mula dekat dengan kaum agama, mulai bekerjasama dengan kaum *Fedayin* karena mendukung banyak cita-cita mereka, khususnya sifat progresif Iran baru dan pembentukan *tentara rakyat* untuk menggantikan

1 Lihat *Kompas*, 10 Maret 1979; lihat juga karangan "Iran: Who is in Charge?", *Newsweek*, 19 Maret 1978.

2 Lihat Paul Balta, "Uphill Task for Khomeini's Men", dalam *The Guardian*, 25 Februari 1979.

ANALISA

tentara kekaisaran. ¹ Satu-satunya kekuatan bersenjata yang dapat diandalkan oleh *Dewan Revolusi* ialah pejuang-pejuang milisi Islam. Bila perang saudara pecah, Uni Soviet bisa menggunakan *doktrin Brezhnev* untuk turun tangan dan membantu golongan kiri. Akan tetapi kemungkinan perang saudara itu kiranya tidak besar berkat sikap bijaksana Pemerintah Bazar-gan, kuatnya oposisi terhadap gagasan *teokrasi* kaum agama fundamentalis pimpinan Khomeini, dan besarnya kekuatan demokratis.

Diperkirakan bahwa dalam referendum yang akan diadakan pada 30 Maret ini mayoritas rakyat akan menyetujui dibentuknya Republik Islam Iran. Akan tetapi tidaklah jelas sejauh mana shariat Islam akan dilaksanakan. Kenyataannya banyak negara yang menamakan diri Islam tidak menegakkan shariat Islam. Sejauh ini yang melaksanakan shariat Islam hanyalah Arab Saudi, Libia dan sejak bulan lalu juga Pakistan. Bahkan di Arab Saudi, negara *teokrasi* yang paling ketat dan paling murni, hukum shariat dilengkapi dengan kode-kode sipil untuk mengatur keuangan dan perdagangan. ² Seperti di lain-lain negeri yang mayoritas penduduknya menganut Islam, juga di Iran tiada kesatuan pendapat mengenai hubungan antara agama dan negara. Paling tidak terdapat tiga aliran pokok. Yang pertama, sekalipun menjunjung tinggi agama, berpendapat bahwa negara harus dibebaskan dari perwalian agama dan dikelola menurut hukumnya sendiri demi kesejahteraan umum rakyat, sedangkan agama terutama adalah urusan umat beragama masing-masing. Aliran ini dianut sebagian cendekiawan dan politisi yang menda-pat pendidikan Barat.

Aliran yang kedua berpendapat bahwa hukum shariat hanya dapat dilaksanakan dalam *negara Islam* dan oleh sebab itu harus dibentuk suatu negara yang tidak hanya menjunjung tinggi asas-asas Islam tetapi juga melaksanakan hukum shariat sepenuhnya. Dengan perkataan lain, sasaran perjuangannya adalah

¹ Lihat laporan AP dalam *Kompas*, 1 Maret 1979

² Lihat karangan "There is But One God Whom Moslems Worship in Increasingly Militant Manner", *The Economist*, 9 September 1978; lihat juga karangan "The Rule of Islam", dalam *Newsweek*, 26 Februari 1979

Republik Islam dalam arti sebenarnya menurut pola negara Arab jaman Nabi. Seperti diuraikan dalam buku Khomeini *Pemerintahan Ahli-ahli Teologi dan Hukum* (*Velayet-e Faqih*), negara itu adalah suatu teokrasi karena diperintah oleh alim ulama yang dianggap menguasai ajaran agama Islam maupun hukum shariatnya.¹ Aliran ini adalah aliran kaum fundamentalis Islam.

Aliran yang ketiga, yang terdiri dari kebanyakan cendekiawan, golongan profesi dan golongan bisnis modern yang mendapatkan pendidikan Barat, menginginkan agar selain asas-asas Islam dilaksanakan pola ide-ide besar dunia dalam masyarakat dan negara. Sasaran perjuangannya bukanlah negara Islam dalam arti sesungguhnya, tetapi suatu *orde Islam* (*Nizam-i Islam*). Yang dimaksud ialah suatu masyarakat baru yang dijiwai cita-cita Islam tetapi diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan jaman modern. Untuk menampungnya Quran, Sunna dan Hadis harus dilengkapi dengan perundang-undangan baru karena tidak menutupi segala bidang kehidupan modern. Untuk bidang-bidang ini yang berlaku ialah asas "tidak bertentangan dengan" sumber-sumber hukum shariat tersebut. Hal ini ditetapkan oleh suatu dewan kecil ahli teologi dan hukum shariat.²

Mengingat perimbangan kekuatan dalam masyarakat Iran sekarang ini, diperkirakan bahwa tidak akan muncul Republik Islam menurut gagasan Khomeini (aliran kedua). Gagasan ini tidak hanya ditentang oleh golongan kiri termasuk kaum *Fedayin*, melainkan juga oleh *Front Nasional*, *Gerakan Pembebasan Iran* dan golongan moderat lain. Golongan fundamentalis Islam yang memperjuangkannya merupakan suatu minoritas. Kebanyakan pemimpin Iran menyadari bahwa negara agama sudah ketinggalan jaman dan tidak dapat menyelesaikan banyak masalah jaman modern.

Dengan demikian kemungkinan besar yang akan muncul adalah negara menurut aliran ketiga, yaitu suatu negara yang

1 Lihat karangan "Khomeini's Government of the Theologians", dalam *Kayhan Internasional*, 31 Januari 1979

2. Lihat karangan "The Soldiers of Allah Advance", dalam *The Economist*, 27 Januari 1979

dijiwai cita-cita Islam tetapi diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan jaman modern. Dalam negara itu akan dilaksanakan asas-asas Islam di samping ide-ide besar dunia. Perkiraan ini didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar Menteri Pemerintah Revolusioner Sementara PM Bazargan adalah dari *Front Nasional* dan *Gerakan Pembebasan Iran*, dua organisasi yang beranggotakan cendekiawan dan golongan profesi yang mendapat pendidikan Barat. ¹ Kebanyakan adalah pejuang hak-hak asasi dan demokrasi sosial. Dr. Bazargan sendiri adalah seorang Islam yang taat tetapi juga seorang cendekiawan progresif. Sebagai seorang profesor dia melibatkan diri dalam politik dan memimpin industri minyak yang dinasionalisasikan di bawah PM Mossadegh, yang pada 1953 memaksa Shah Reza Pahlevi pergi tetapi pada gilirannya digulingkan dalam suatu kudeta militer pro Shah. Kudeta itu melancarkan kariernya sebagai lawan Shah, pembela hak-hak asasi dan pejuang demokrasi sosial Islam. Dia mempunyai komitmen akan agama maupun kemajuan modern dan sejak lama memperjuangkan semacam sosialisme Islam. Salah satu dalilnya ialah bahwa tirani atau kediktatoran telah membuat dunia Islam macet dan terbelakang. Dia kurang senang dengan rezim-rezim Islam yang keras seperti di Libia, Arab Saudi dan Pakistan. ²

Kemungkinan besar gagasannya mengenai hari depan Iran akan keluar sebagai pemenang. Golongan kiri menolak gagasan negara agama kaum fundamentalis Islam, tetapi kiranya dapat menerima demokrasi sosial Islam PM Bazargan dan kawan-kawan. Demikianpun golongan fundamentalis dengan tegas menolak gagasan republik rakyat golongan kiri tetapi kiranya dapat menerima demokrasi sosial Islam itu. Secara demikian yang akan keluar sebagai kelompok yang berkuasa bukanlah golongan kiri dan juga bukan golongan ekstrem kanan, melainkan golongan tengah yang moderat, yang taat kepada agama Islam tetapi juga terbuka untuk ide-ide besar dunia yang telah diuji kebenarannya dan mendatangkan modernisasi serta kemajuan.

1 Lihat karangan "The Liberal Revolution", *Far Eastern Economic Review*, 23 Pebruari 1979

2 Lihat karangan "Khomeini's Man: No Vice, No Corruption, No New Arms", dalam *U.S. News and World Report*, 26 Pebruari 1979; lihat juga "Khomeini's Engineer", *Newsweek*, 19 Pebruari 1979

4. IMPAK ATAS KAWASAN DAN DUNIA

Pergolakan di Iran yang berhasil menumbangkan kekuasaan Shah Reza Pahlavi itu menimbulkan gelombang-gelombang kejutan yang mempunyai berbagai akibat penting atas kawasan maupun atas dunia dan perimbangan kekuatan global. Beberapa tahun yang lalu seorang Dubes Amerika Serikat di Teheran mengatakan bahwa "dalam arti politik Iran adalah pusat dunia".¹ Pernyataan ini mungkin berlebihan tetapi didukung berbagai kenyataan. Pertama, Iran adalah penuplai minyak yang penting bagi Eropa Barat, Jepang dan Amerika Serikat. Kedua, bersama-sama dengan Oman Iran menguasai Selat Hormuz di gerbang Teluk Parsi yang dilewati kapal-kapal tanki yang mengangkut 70% impor minyak Eropa Barat dan 90% kebutuhan minyak Jepang, sedangkan impor minyak Amerika yang juga diangkut lewat selat itu terus meningkat dan pada dasawarsa 1980-an akan mencapai 60%. Menurunnya produksi minyak Iran baru-baru ini telah menguras kelebihan sementara suplai minyak dunia dan sebagai akibatnya harga minyak terus meningkat. Arti Iran sehubungan dengan keamanan suplai minyak itu menjadi lebih besar karena sejak penarikan kekuatan militer Inggris dari kawasan Iran dengan bantuan Barat telah berhasil membangun suatu kekuatan militer yang besar sehingga dapat bertindak sebagai pelindung keamanan seluruh kawasan Teluk Parsi. AU-nya mempunyai perlengkapan hebat dan kini bertanggung jawab atas pengawasan udara, sedangkan AL-nya tahun-tahun belakangan ini berkembang dengan cepat sehingga dapat memberikan sumbangan penting dalam menjaga perimbangan kekuatan maritim di kawasan. Selanjutnya Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlevi merupakan suatu sekutu Barat yang dapat diandalkan. Bersama-sama dengan negara-negara lain yang moderat di kawasan, Iran memberikan bantuan kepada kekuatan-kekuatan anti Marxis di Oman dan Afrika. Akhirnya Iran adalah kawan dagang yang semakin penting bagi negara-negara Barat dan Jepang.²

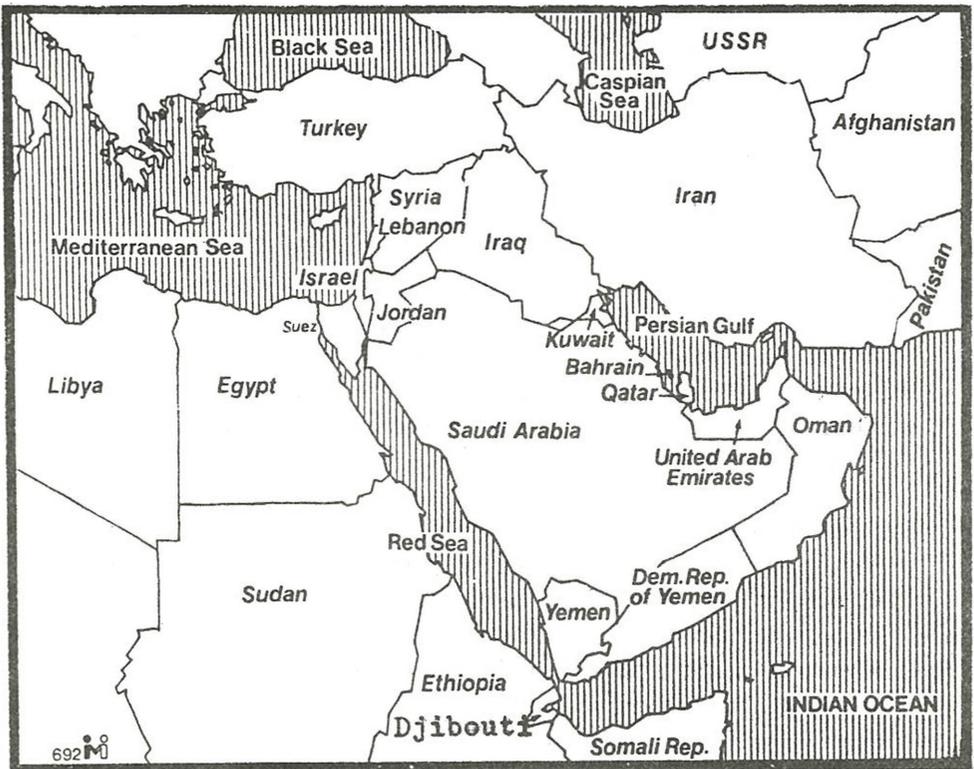
1 Dikutip dari Ian Greig, "Iran and the Lengthening Soviet Shadow", *FARI*, 22/1978

2 *Ibid.*

ANALISA

Sebagai akibat pergolakan dan perubahan-perubahan di Iran itu, Irak menghentikan pendekatannya ke Barat, di kalangan pemimpin-pemimpin Arab Saudi terjadi perdebatan sengit mengenai tepatnya politik luar negeri yang mereka anut sejauh ini, dan diplomasi perdamaian Mesir-Israel menjadi lebih mendesak. Di tingkat global jatuhnya Shah Iran itu merupakan suatu pukulan berat bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tetapi berarti suatu kemajuan bagi Uni Soviet yang mendapat peluang untuk memperluas dan memperkuat pengaruhnya di kawasan yang berkat kekayaan minyaknya serta letak geografisnya mempunyai arti strategis yang sangat besar dalam pertarungan Timur-Barat (lihat Peta).

Timur Tengah



Dikutip dari *The Guardian*, 21 Januari 1979

Pada awal Nopember 1978 pemimpin-pemimpin Irak secara serius memikirkan untuk mengendorkan hubungan negara mereka dengan Uni Soviet dan mempererat hubungannya dengan negara-negara Barat. Akan tetapi dengan meningkatnya krisis di Iran Irak berganti haluan lagi. Pada pertengahan Desember 1978 Wakil Presiden Saddam Hussein mengadakan kunjungan ke Moskwa dan Havana dan sejak itu kerja sama antara Irak dan Uni Soviet serta Kuba meningkat.

Perubahan itu untuk sebagian besar adalah akibat persepsi menghilangnya Iran sebagai kekuatan dominan di kawasan dan secara demikian memberikan peluang kepada Irak untuk menggantikannya. Sehubungan dengan itu Irak mulai memperlengkapi angkatan bersenjata dengan bantuan Uni Soviet yang pada prinsipnya bersedia untuk memberikan kapal-kapal peluru kendali, hovercraft, kapal-kapal pendarat tank dan tiga kapal selam kepada Irak. Akan tetapi sebagai imbalan Uni Soviet minta kepada Irak agar mengkoordinir politiknya dengannya dan menarik keberatannya terhadap maksud-maksud Soviet di Tanduk Afrika. Irak rupanya bersedia untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Soviet itu biarpun tidak semuanya. Masalah langsung yang dihadapi Irak sekarang adalah waktu. Bahkan sekalipun seluruh perlengkapan Soviet itu langsung dikirimkan, Irak memerlukan beberapa bulan untuk melatih orang-orangnya.¹

Tanggapan Irak atas pergolakan di Iran itu meningkatkan kegelisahan di Riyadh dan menimbulkan suatu perdebatan sengit di antara para pemimpin Saudi. Menjelang akhir 1978 Arab Saudi mulai mendekati front Irak-Suriah dan menanggapi isyarat-isyarat Uni Soviet. Akan tetapi pemimpin-pemimpin Saudi kini cemas dengan prospek terjepit antara Yaman Selatan dengan konsentrasi kekuatan blok Soviet di sebelah selatan dan suatu Irak yang pro Moskwa dan dipersenjatai dengan baik di sebelah Timur Laut, sedangkan Iran di seberangnya kini tidak menentu.

1 Lihat karangan "The Shock-waves From Iran", *Foreign Report*, 10 Januari 1978

ANALISA

Arab Saudi mula-mula mengharap bisa mendorong Irak dan Suriah ke Barat, tetapi harapan itu ternyata sia-sia. Sebagai akibatnya pemimpin-pemimpin Saudi pecah mengenai jalan yang harus ditempuh. Pangeran Abdullah, orang ketiga dalam hirarki Saudi, mendesak agar Arab Saudi melepaskan garis Pan Arabnya yang diterima pada KTT Bagdad awal Nopember 1978 untuk melawan persetujuan Camp David, dan segera berbalik lagi ke Mesir dan Amerika Serikat. Jika nasihatnya itu diterima, maka rencana yang disusun oleh Amerika Serikat, Arab Saudi dan Mesir pada musim panas yang lalu untuk menciptakan suatu sistem pertahanan darat dan laut di kawasan Laut Merah dapat dilaksanakan.

Biarpun setuju dengan evaluasi Pangeran Abdullah mengenai arah yang diambil oleh Irak dan Suriah, Pangeran Mahkota Fahd memperingatkan rekan-rekannya agar tidak mengambil tindakan serupa itu secara terburu-buru, dan menandakan bahwa suatu gerak kembali yang tajam ke Mesir pada tahap sekarang ini bisa mendorong Irak dan Suriah lebih jauh ke rangkulan Soviet. Karena merasa bahwa kejadian-kejadian di Iran belum berakhir, Fahd berpendapat bahwa Arab Saudi sebaiknya menunggu dahulu sebelum mengambil keputusan.

Raja Khalid belum menjatuhkan pilihannya antara pendapat-pendapat itu. Dalam keadaan ini diplomasi Saudi nampak tidak menentu. Pada awal Januari 1979 Duta Besar Saudi di Kairo memberitahukan kepada Presiden Sadat bahwa Pemerintah Saudi menganggap perselisihannya dengan Mesir telah lampau, dan bahwa Raja Khalid bersedia datang sendiri di Aswan untuk mengadakan pertemuan rujuk kembali antara kedua negara. Akan tetapi Pangeran Fahd menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa Duta Besar berbicara tanpa wewenang.¹ Namun sementara itu Presiden Sadat mengatakan kepada penasehat-penasehat dekatnya meramalkan dengan tepat bahwa politik anti Camp David Arab Saudi hanya akan bertahan beberapa minggu dan bahwa Riyadh akhirnya akan kembali

¹ *Ibid.*

ke perlindungan militer dan politik Kairo karena tidak punya pilihan selain mendukung usul persetujuan Mesir-Israel.

Presiden Sadat juga memberitahukan kepada Amerika Serikat ingin menghidupkan kembali perundingan-perundingan Mesir-Israel yang macet tanpa menundanya lebih lama lagi. Dia menawarkan akan memberikan konsesi-konsesi kalau Israel juga bersedia melakukannya agar perjanjian perdamaian dapat segera ditandatangani. Hal ini menjadi mendesak dengan kemajuan-kemajuan strategis yang dicapai Uni Soviet di Afghanistan, Yaman Selatan dan Ethiopia, dan dengan terjadinya pergolakan di Iran yang bisa mengubah perimbangan kekuatan global. Tercapainya perdamaian dengan Israel akan membebaskan angkatan bersenjata Mesir untuk bertindak di Tanduk Afrika serta Laut Merah dan meratakan jalan bagi pelaksanaan rencana kerja sama militer dengan Israel yang disusun di KTT Camp David.¹

Diperkirakan oleh banyak orang bahwa perubahan radikal di Iran itu akan disusul pergolakan-pergolakan serupa di negara-negara Arab Teluk Parsi. Tanpa adanya suatu pemerintah di Iran yang kuat dan pro Barat seperti rezim Shah, kiranya tiada kekuatan yang dapat diandalkan untuk turun tangan bila terjadi usaha revolusi komunis atau radikal di negara-negara itu.

Jatuhnya Shah Iran itu juga mempunyai berbagai akibat global dan dapat mengubah perimbangan kekuatan Timur-Barat. Di satu pihak perubahan yang terjadi itu merupakan suatu pukulan berat untuk negara-negara Barat dan di lain pihak suatu keuntungan bagi Uni Soviet.² Siapa pun akan keluar dari perebutan kekuasaan sekarang ini dia tidak akan meneruskan politik luar negeri Shah yang sangat menguntungkan Barat. Iran akan memutuskan aliansinya dengan Barat dan tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan di wilayahnya guna memata-matai Uni Soviet.³ Dia juga tidak akan bersedia meneruskan peranannya sebagai polisi Ame-

1 *Ibid.*

2 Lihat karangan "Shock Waves from Iran", *U.S. News and World Report*, 26 Pebruari 1979

3 Lihat laporan AP dalam *Kompas*, 14 Maret 1979

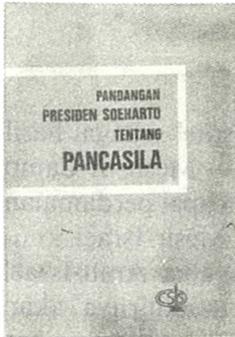
rika Serikat di kawasan Teluk Parsi. Selanjutnya dia akan mengurangi pembelian senjata secara tajam dan membatalkan sebagian besar kontrak transaksi militernya. Dana yang akan dihemat secara demikian akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai akibatnya pengangguran di negara-negara Barat yang bersangkutan akan meningkat dan laju pertumbuhan ekonominya menurun, terutama pula karena Iran meninjau kembali politik perminyakannya. Baik produksi maupun ekspor minyaknya akan dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhannya.¹ Dengan demikian harga minyak di pasaran dunia yang dewasa ini resminya adalah US\$ 14 per barrel akan terus meningkat dan pada akhir tahun ini dapat mencapai US\$ 20 atau lebih per barrel.

Bila Amerika Serikat tidak dapat meyakinkan lain-lain negara pengeksport minyak di Timur Tengah bahwa dia dapat menemukan cara-cara yang lebih baik untuk menolong sekutu-sekutunya, bisa terjadi suatu pergeseran dalam perimbangan kekuatan Timur-Barat yang berbahaya. Pergeseran serupa itu dapat menunjang perluasan pengaruh Soviet di kawasan secara yang merugikan Amerika Serikat. Negara-negara Teluk Parsi lain, khususnya Arab Saudi, bisa tergoda untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Amerika Serikat dan mencari akomodasi dengan Uni Soviet. Kepercayaan mereka pada Amerika Serikat sebagai pelindung mereka goyah akibat ketidakmampuannya untuk menyelamatkan Pemerintah Shah.

Bagi negara-negara pengeksport minyak perubahan di Iran itu menguntungkan dalam arti bahwa berkat naiknya harga minyak itu pendapatan mereka akan banyak meningkat pula. Sebaliknya kenaikan harga itu merupakan suatu pukulan bagi negara-negara yang mengimpor minyak, khususnya negara-negara berkembang yang tidak kaya, dan dapat menimbulkan resesi dan akibat-akibat buruk lain.

¹ Lihat laporan AP dalam *Kompas*, 28 Februari 1979; lihat juga karangan "Counting the Cost of Khomeini", *Foreign Report*, 14 Februari 1979

Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim tetapi bukan negara Islam, kemenangan Ayatullah Khomeini dan pengikut-pengikutnya itu dapat mempunyai pengaruh yang kurang menyenangkan. Kaum fundamentalis di negara-negara itu merasa mendapat angin dan kemungkinan besar akan meningkatkan perjuangan mereka. Akan tetapi Pemerintah negara-negara yang bersangkutan kiranya tidak perlu takut. Kaum fundamentalis di mana pun merupakan minoritas biarpun militan. Namun Pemerintah harus waspada dan mengikuti perkembangan itu dengan saksama serta menindak dengan tegas apabila kaum fundamentalis menempuh jalan yang tidak konstitusional dan melanggar hukum. Minoritas tidak boleh dibiarkan memaksakan kemauannya atas mayoritas.



Masih tersedia: _____

Buku **PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA**, disusun dan diterbitkan oleh CSIS, tebal 95 halaman.

Edisi biasa (kertas koran) a Rp. 300,—
Edisi lux (kertas HVS) a Rp. 1.200,—

Juga masih tersedia Analisa-Analisa tentang:

- ”Pancasila Arti dan Penerapannya” (A3/78);
 memuat karangan tentang *’Negara dan Ideologi Negara (Suatu Pengantar)’* *’Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia’*; *’Pancasila Moral Bangsa Indonesia’ (Suatu Pengantar)’* - *’ Menuju Sistem Ekonomi Pancasila’* a Rp. 700,—
- ”Beberapa Segi Pembangunan” (A3+4/77); a.l. memuat karangan tentang *’Demokrasi Pancasila’* a Rp. 700,—
- ”Beberapa Segi Pembangunan Nasional” (A7/78);
 a.l. memuat karangan tentang *’Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Arti Materilnya’* a Rp. 700,—
- ”Sumpah Pemuda dan Persatuan Indonesia” (A10/78)
 a.l. memuat karangan tentang *’Pancasila dan Kebudayaan Nasional Indonesia’* a Rp. 700,—
- ”Pembinaan Generasi Muda” (A12/78); a.l. memuat karangan tentang *’Manusia Pancasila Sasaran Pembinaan Generasi Muda’* a Rp. 700,—

Pesanlah segera ke BIRO PUBLIKASI CSIS, Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489